

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan (*UU 43/2008 Pasal 1*). Wilayah perbatasan RI dengan negara tetangga umumnya merupakan daerah yang tersolasi apabila dibandingkan dengan wilayah lain. Pentingnya kawasan perbatasan dalam pengembangan wilayah adalah karena pada umumnya kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis dan kaya akan sumber daya alam yang melimpah. Apabila dikelola secara baik dan terarah dapat dipastikan kawasan perbatasan yang berada di Indonesia akan maju setara dengan kawasan perkotaan lainnya. Selain itu, wilayah perbatasan memiliki peran yang senting dan strategis, karena wilayah perbatasan merupakan wilayah yang merefleksikan halaman depan suatu negara (Suburi, 2012). Bagi Indonesia, kawasan perbatasan merupakan kawasan yang strategis dan vital dalam konstelasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dikatakan strategis karena kawasan perbatasan secara geografis kawasan perbatasan memiliki potensi sumber daya alam dan peluan pasar karena kedekatannya dengan negara tetangga dan secara politik kawasan perbatasan berkaitan dengan aspek kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan, nasionalisme, ideologi, sosial budaya dan ekonomi.

Wilayah perbatasan Kalimantan yang panjangnya mencapai 2.004 kilo meter belum mampu diawasi secara optimal, karena keterbatasan kemampuan pemerintah untuk menyediakan aparat penjaga perbatasan, sehingga hal ini menjadikan kawasan perbatasan sangat rawa dari infiltrasi asing, pencaplokan wilayah, pencurian hasil sumber daya alam yang terdapat disepanjang daerah (Dirjen Imigrasi, 2007). Pembangunan kawasan perbatasan di Kalimantan khususnya Kalimantan Timur merupakan bagian integral dari pembangunan kawasan perbatasan secara Nasional. Wilayah perbatasan di Kalimantan Timur memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, serta merupakan wilayah yang sangat strategis bagi pertahanan dan keamanan negara. Namun secara umum pembangunan wilayah perbatasan masih jauh tertinggal dibandingkan dengan pembangunan di wilayah negara tetangga (Partnership Policy Paper No. 2/2011).

Kabupaten Malinau merupakan salah satu Kabupaten di Kalimantan Utara yang berada di wilayah perbatasan RI-Malaysia dan terdapat lima kecamatan di Kabupaten Malinau yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Berdasarkan *Grand Design* Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan di Indonesia Tahun 2011-2025, sebagai upaya perwujudan perbatasan sebagai beranda depan negara maka telah ditetapkan lokasi prioritas pengembangan perbatasan. Kawasan perbatasan Kabupaten Malinau termasuk dalam lokasi prioritas pengembangan perbatasan di Kabupaten Malinau dan berdasarkan RTRW Kabupaten Malinau tahun 2011-2031 masalah yang lain yang muncul di kawasan perbatasan Kabupaten Malinau adalah kesenjangan ekonomi antar pusat kecamatan dengan desa-desa sekitar, karena tingkat aksesibilitas yang rendah dan kelengkapan infrastruktur yang minim tingkat ketergantungan penduduk yang ada di kawasan perbatasan terhadap kebutuhan-kebutuhan pokok yang sangat tinggi dan lebih banyak di penuhi oleh Negara Malaysia, aksesibilitas ke ibukota kabupaten yang sangat rendah, penyelundupan, pemindahan patok batas negara yang dan kegiatan *illegal logging*.

Kawasan perbatasan yang berada di Kabupaten Malinau memiliki potensi perekonomian, lokasi strategis dan didukung oleh askes utama yang dapat berkembang seperti beberapa kawasan perbatasan yang berada di Pulau Jawa. Potensi perekonomian di kawasan perbatasan Kabupaten Malinau sangat potensial untuk dikembangkan hal ini dikarenakan pada kawasan perbatasan Kabupaten Malinau memiliki deposit sumber daya yang melimpah baik dari sumber daya terbarukan maupun sumber daya tidak terbarukan. Selain itu, didukung oleh wilayah produktif pengembangan yang sangat luas yang dapat membantu kawasan perbatasan Kabupaten Malinau untuk mengembangkan potensi perekonomiannya sehingga dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan memacu pertumbuhan perekonomian di kawasan perbatasan Kabupaten Malinau.

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dan aspek yang terkait dalam perkembangan kawasan perbatasan di Kabupaten Malinau, maka dilakukan penelitian yang berjudul **“Kajian Pembangunan Ekonomi Kawasan Perbatasan Kabupaten Malinau”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang terdapat di kawasan perbatasan Kabupaten Malinau sehingga kawasan perbatasan di Kabupaten Malinau sulit untuk berkembang sedangkan sumber daya alam yang tersedia melimpah dan belum bisa dimanfaatkan secara maksimal.
2. Terjadinya kesenjangan pembangunan antara kawasan perbatasan dengan kota disekitar ibukota kabupaten dan selain itu juga banyaknya bantuan berupa bahan makanan pokok, kemudahan aksesibilitas dan lapangan pekerjaan yang diberikan oleh Negara Malaysia mengakibatkan orientasi kegiatan penduduk terutama sosial perekonomian lebih berkiblat pada negara tetangga. Secara jangka panjang kondisi ini berpotensi untuk menurunkan jiwa nasionalisme masyarakat Kawasan Perbatasan di Kabupaten Malinau.
3. Belum tersedianya sarana dan prasarana yang terdapat di Kawasan Perbatasan Kabupaten Malinau belum memadai dikarenakan kondisi geografis dari kawasan perbatasan yang berada di wilayah pegunungan dengan lereng yang curam yang menyebabkan belum terhubungnya prasarana jalan yang menghubungkan antara Ibukota Kabupaten dengan Kecamatan dan antar desa di kawasan perbatasan, banyaknya jalan yang terputus dan perkerasan yang masih berupa tanah
4. Kurangnya perhatian dari pemerintah Indonesia terhadap kawasan perbatasan di Kabupaten Malinau. Hal ini disebabkan karena kawasan perbatasan di Kabupaten Malinau belum memiliki peraturan dan ketentuan hukum yang cukup kuat mengenai perbatasan seperti belum adanya belum ditetapkan secara final untuk RTRW Provinsi sehingga berpengaruh penyusunan RTRW Kab. Malinau untuk Malinau perubahan KBNK (Kawasan Budidaya Non Hutan) dari 256.205,51 ha menjadi 452.465,26 ha. Selain itu belum adanya peraturan kawasan terkait peranan kawasan perbatasan Kabupaten Malinau dan kawasan konservasi.

### **1.3 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kondisi komponen pendukung ekonomi di kawasan perbatasan Kabupaten Malinau ?
2. Bagaimana permasalahan komponen pendukung ekonomi di kawasan perbatasan Kabupaten Malinau ?

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kondisi komponen pendukung ekonomi yang terdapat di kawasan perbatasan Kabupaten Malinau dan seberapa besar pengaruhnya terhadap perkembangan wilayah perbatasan.
2. Untuk mengetahui permasalahan komponen pendukung ekonomi di kawasan perbatasan Kabupaten Malinau dan seberapa penting permasalahan pembangunan tersebut mempengaruhi perkembangan pertumbuhan ekonomi masyarakat kawasan perbatasan Kabupaten Malinau.

### **1.4.2 Manfaat**

Manfaat dari penelitian ini yaitu :

#### **1. Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan**

Penelitian ini menyumbangkan berberapa ilmu pengetahuan khususnya dunia perencanaan wilayah dan kota mengenai karakteristik ekonomi kawasan perbatasan antar Negara di Indonesia dan menambah wawasan mengenai potensi dan sumber daya alam yang dimiliki oleh kawasan perbatasan.

#### **2. Manfaat Bagi Pemerintah**

Bagi pemerintah, hasil penelitian ini bertujuan untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan dan konsep pengembangan yang menjadikan kawasan perbatasan antar negara yang sesuai dengan karakteristik fisik yang dimiliki.

## **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup pada penelitian ini terbagi atas dua bahasan yakni ruang lingkup materi dan ruang lingkup wilayah.

### **1.5.1 Ruang Lingkup Materi**

Ruang Lingkup materi pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Komponen pendukung ekonomi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kondisi sosial masyarakat yang meliputi kependudukan dan interaksi masyarakat perbatasan, kondisi ekonomi yang meliputi aksesibilitas dan komoditas unggulan, kondisi keamanan yang meliputi konflik keamanan dan sistem pengawasan keamanan dikawasan perbatasan.

2. Output dari penelitian ini yaitu kajian pembangunan ekonomi kawasan perbatasan yang dilihat dari kondisi sosial masyarakat, kondisi ekonomi dan kondisi keamanan. Untuk mengetahui tingkat kesenjangan yang terjadi dilakukan analisis komparasi dengan menggabungkan analisis kesenjangan dengan kondisi sosial masyarakat, kondisi ekonomi dan kondisi keamanan yang kemudian diidentifikasi potensi dan masalahnya yang akan digunakan untuk rekomendasi pengembangan kawasan perbatasan Kabupaten Malinau.

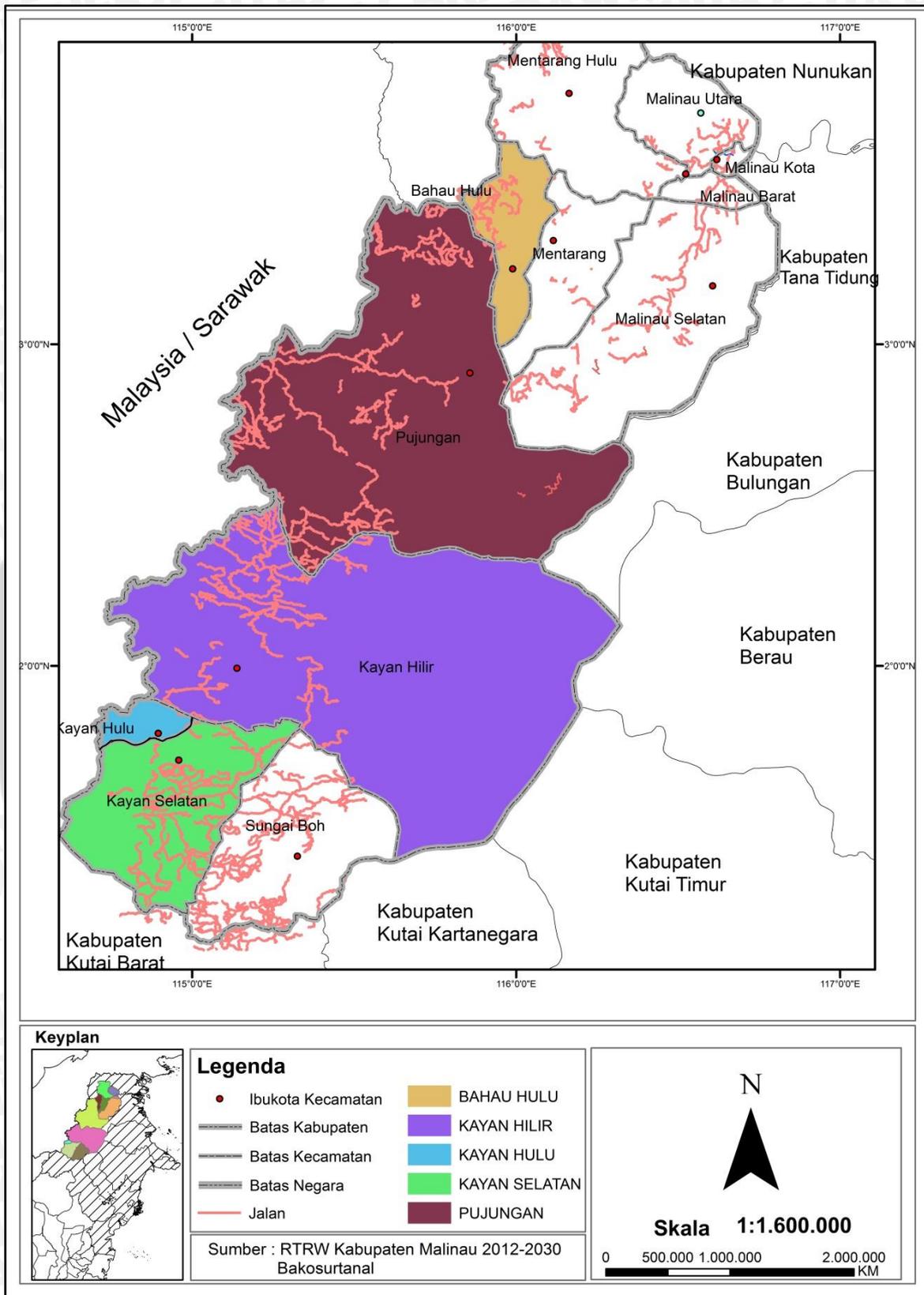
### 1.5.2 Ruang Lingkup Wilayah

Kabupaten Malinau merupakan salah satu dari 5 daerah otonom yang ada di Provinsi Kalimantan Utara dengan luas wilayah  $\pm 39.766,33 \text{ Km}^2$  atau 3.976.632,67 Ha dan secara geografis terletak pada posisi  $114^{\circ}35'22''$  -  $116^{\circ}50'55''$ BT dan  $1^{\circ}21'36''$  -  $4^{\circ}10'55''$  LU. Secara administratif Kabupaten Malinau memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Nunukan
- Sebelah Timur : Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau, Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Kutai Timur
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Kertanegara
- Sebelah Barat : Negara Bagian Malaysia (Sarawak).

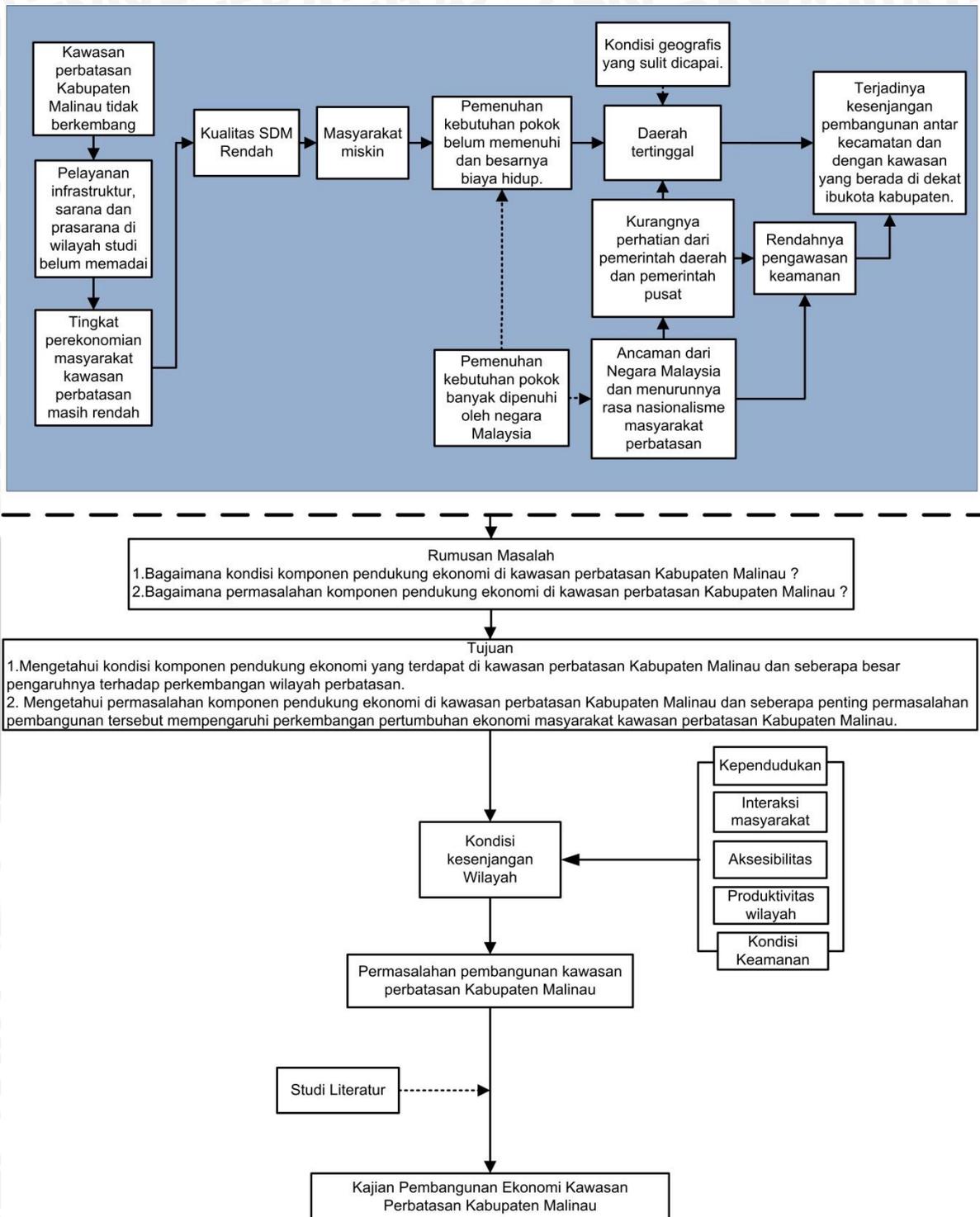
Wilayah studi terletak pada kawasan perbatasan terletak di Kabupaten Malinau yang berbatasan langsung dengan wilayah Serawak (Negara bagian Malaysia) dengan panjang keseluruhan  $\pm 438 \text{ Km}$ . Terdapat 5 Kecamatan di Kabupaten Malinau berbatasan langsung dengan Serawak (Negara bagian Malaysia Timur), yaitu :

- Kecamatan Kayan Selatan
- Kecamatan Pujungan
- Kecamatan Kayan Hulu
- Kecamatan Bahau Hulu
- Kecamatan Kayan Hilir



Gambar 1. 1 Wilayah Studi

## 1.6 Kerangka Pemikiran



Latar belakang dan identifikasi masalah

**Gambar 1. 2 Gambar Kerangka Pemikiran**

## **1.7 Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam laporan mengenai Kajian Pembangunan Ekonomi Kawasan Perbatasan Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab satu berisikan mengenai latar belakang, identifikasi masalah yang menjelaskan permasalahan secara umum, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup yang bertujuan untuk membatasi penelitian, kerangka pemikiran yang menjadi landasan pemikiran dalam melakukan penelitian, serta sistematika pembahasan dalam penyusunan laporan penelitian.

### **BAB II TINJAUAN TEORI**

Bab dua berisikan mengenai teori-teori yang berasal dari berbagai literatur yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian mengenai Kajian Pembangunan Ekonomi Kawasan Perbatasan Kabupaten Malinau.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab tiga berisikan metode yang digunakan dalam penyusunan laporan, yang meliputi pendekatan penelitian, metode pengumpulan data dan teknik analisa yang digunakan dalam penelitian.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab empat berisikan tentang karakteristik kawasan perbatasan dilihat dari kondisi ekonomi dengan menggunakan analisis komoditas unggulan dan aksesibilitas, kondisi sosial masyarakat dilihat dari kependudukan dan interaksi masyarakat perbatasan dan kondisi keamanan. Digunakan pula akar masalah sehingga dapat diketahui permasalahan pembangunan di kawasan perbatasan Kabupaten Malinau serta rekomendasi pembangunan kawasan perbatasan yang dapat diterapkan.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab lima berisi kesimpulan dan saran dari seluruh pembahasan bab terdahulu serta saran-saran yang digunakan untuk perbaikan studi mengenai penelitian berjudul Kajian Pembangunan Ekonomi Kawasan Perbatasan Kabupaten Malinau.